

PEMBERDAYAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN MEMILAH SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA CIMAHI

**Alfredo Pebrian Munthe¹⁾, Agustina Setiawan²⁾, Dicky Febriansyah
Rokhmat³⁾**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Meningkatnya volume sampah rumah tangga di Kota Cimahi serta rendahnya ketertiban masyarakat dalam memilah sampah menjadi permasalahan yang perlu ditangani melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi dalam meningkatkan ketertiban memilah sampah rumah tangga. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori pemberdayaan Totok Mardikanto yang meliputi dimensi *enabling*, *empowering*, dan *protection*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH Kota Cimahi telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan melalui sosialisasi, edukasi, pelatihan, pembinaan kader lingkungan, pengembangan bank sampah, penyediaan sarana, serta pengawasan kegiatan pemilahan sampah. Program tersebut mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga. Namun, pemerataan fasilitas dan penegakan aturan masih belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan DLH Kota Cimahi telah berkontribusi dalam meningkatkan ketertiban memilah sampah rumah tangga, meskipun masih diperlukan penguatan fasilitas, pengawasan, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Pemilahan Sampah Rumah Tangga, Ketertiban Masyarakat, Kota Cimahi

Abstract

The increasing volume of household waste in Cimahi City and the low level of public order in sorting waste are issues that need to be addressed through community empowerment. This study aims to analyze the empowerment carried out by the Cimahi City Environmental Agency (DLH) in improving the order of sorting household waste. The study used a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The analysis was conducted based on Totok Mardikanto's empowerment theory which includes the dimensions of enabling, empowering, and protection. The results show that the Cimahi City DLH has

implemented various empowerment programs through socialization, education, training, environmental cadre development, waste bank development, provision of facilities, and supervision of waste sorting activities. These programs have been able to increase public knowledge, awareness, and participation in sorting household waste. However, the distribution of facilities and enforcement of regulations are still not optimal. This study concludes that the empowerment carried out by the Cimahi City DLH has contributed to improving the order of sorting household waste, although continued strengthening of facilities, supervision, and community participation is still needed.

Keywords: Empowerment, Environmental Agency, Household waste sorting, Community Compliance, Cimahi City

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Sampah rumah tangga menjadi penyumbang terbesar timbulan sampah di Indonesia sehingga diperlukan pengelolaan yang efektif sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah yang tidak optimal dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, dan penurunan kualitas lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Sudharto, 2010).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui berbagai tindakan, termasuk melakukan pemilahan sampah dari sumbernya (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Di Provinsi Jawa Barat, sebagian besar timbulan sampah berasal dari sektor rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengurangan serta pemilahan sampah sejak dari rumah. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah yang berkelanjutan (KLH/BPLH, 2025; Atik, 2017).

Kota Cimahi merupakan salah satu daerah yang menghadapi peningkatan volume sampah rumah tangga dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melaksanakan berbagai program pengelolaan sampah, salah satunya Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah (GRAK OMPIMPA) yang bertujuan mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Program ini didukung oleh Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, seperti belum meratanya sosialisasi, terbatasnya fasilitas pendukung, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah rumah tangga secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar tujuan pengurangan volume sampah dapat tercapai secara optimal.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Menurut Mardikanto (2010), pemberdayaan dilakukan melalui tiga dimensi utama, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protection*. Ketiga dimensi tersebut diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kemampuan, kesempatan, dan perlindungan dalam menjalankan perannya secara aktif (Mardikanto, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam meningkatkan ketertiban memilah sampah rumah tangga berdasarkan dimensi *enabling*, *empowering*, dan *protection* dari teori pemberdayaan Totok Mardikanto. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisa Pemberdayaan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Ketertiban Memilah Sampah Rumah Tangga Di Kota Cimahi. Subjek penelitian meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Kepala UPTD Pelayanan Persampahan, Rumah Tangga, Kader Grak Ompimpa. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi terstruktur, serta dokumentasi berupa arsip resmi, laporan kegiatan, dan data sekunder dari literatur maupun media daring. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai Pemberdayaan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Ketertiban Memilah Sampah Rumah Tangga Di Kota Cimahi.

PEMBAHASAN

Kota Cimahi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi dengan aktivitas permukiman, perdagangan, dan jasa yang terus berkembang. Pertumbuhan jumlah penduduk serta meningkatnya aktivitas masyarakat berimplikasi pada bertambahnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari, khususnya sampah rumah tangga. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang tidak hanya berfokus pada pengangkutan dan pengolahan sampah, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat melalui kegiatan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melaksanakan berbagai program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program sosialisasi, edukasi, pembentukan kader

lingkungan, pengembangan bank sampah, serta Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah (GRAK OMPIMPA). Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah rumah tangga sehingga jumlah sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir dapat dikurangi.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat menjadi pendekatan yang relevan karena menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara mandiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini membahas Pemberdayaan Dinas Lingkungan Hidup dalam Meningkatkan Ketertiban Pemilahan Sampah Rumah Tangga di Kota Cimahi dengan menggunakan teori pemberdayaan dari Totok Mardikanto (2010) yang meliputi dimensi *enabling*, *empowering*, dan *protection*. Melalui ketiga dimensi tersebut, penelitian ini menganalisis sejauh mana upaya pemberdayaan yang dilakukan DLH Kota Cimahi mampu menciptakan kondisi yang mendukung, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga sehingga dapat meningkatkan ketertiban masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya.

Dimensi *Enabling* (Menciptakan Suasana yang Mendukung Potensi Masyarakat Berkembang)

Dimensi *enabling* menekankan pentingnya penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilahan sampah. Dalam penelitian ini, dimensi *enabling* dianalisis melalui indikator sumber daya manusia, fasilitas, dan teknis pelaksanaan program.

a. Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi telah memiliki sumber daya manusia yang cukup kompeten untuk mendukung pelaksanaan program pemilahan sampah rumah tangga. Pelaksanaan program tidak hanya melibatkan aparatur DLH, tetapi juga didukung oleh kader lingkungan, pengelola bank sampah, serta kelompok masyarakat yang berperan sebagai penggerak di tingkat wilayah. Melalui pembagian tugas yang jelas antara DLH, UPTD Pelayanan Persampahan, dan kader lingkungan, proses sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Keberadaan kader lingkungan menjadi faktor penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kader berperan sebagai agen perubahan yang memberikan edukasi mengenai pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Kondisi ini menunjukkan bahwa DLH telah berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui penguatan sumber daya manusia. Namun demikian, jumlah kader dan intensitas pendampingan masih perlu ditingkatkan agar seluruh wilayah Kota Cimahi memperoleh manfaat yang sama dari program pemberdayaan.

b. Fasilitas

Penyediaan fasilitas merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pemilahan sampah rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH Kota Cimahi telah menyediakan berbagai sarana pendukung seperti TPS 3R, Bank Sampah Induk, bank sampah unit, serta fasilitas pengolahan sampah berbasis masyarakat. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengembangan TPS menjadi TPS 3R guna mendukung pengolahan sampah yang lebih efektif.

Meskipun demikian, ketersediaan fasilitas tersebut belum merata di seluruh wilayah Kota Cimahi. Beberapa lingkungan masyarakat masih mengalami keterbatasan tempat sampah terpilah dan sarana pengolahan sampah. Akibatnya, sebagian masyarakat masih mencampurkan sampah organik, anorganik, dan residu dalam satu wadah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas telah mendukung pelaksanaan program, namun

belum sepenuhnya mampu mendorong ketertiban masyarakat secara merata.

c. Teknis

Dari aspek teknis, DLH Kota Cimahi telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat terkait tata cara pemilahan sampah rumah tangga. Program GRAK OMPIMPA menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Selain itu, pengolahan sampah organik menjadi kompos atau pakan maggot serta pemanfaatan sampah anorganik melalui bank sampah merupakan bentuk dukungan teknis yang diberikan kepada masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori Mardikanto (2010), aspek teknis yang dilakukan DLH telah mencerminkan proses *enabling*, karena pemerintah berupaya menyediakan informasi, pengetahuan, dan akses yang dibutuhkan masyarakat untuk mulai melakukan pemilahan sampah. Namun efektivitas pelaksanaan teknis masih menghadapi kendala berupa belum meratanya sosialisasi dan rendahnya partisipasi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, penguatan aspek teknis masih diperlukan agar seluruh masyarakat mampu menerapkan pemilahan sampah secara konsisten.

Dimensi *Empowering* (Memperkuat Potensi yang Dimiliki Masyarakat)

Dimensi *empowering* berfokus pada upaya meningkatkan kapasitas, motivasi, dan kemandirian masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan pemilahan sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

a. Kapasitas

Peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pembinaan kader lingkungan, serta pengembangan bank sampah. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai jenis sampah, teknik pemilahan, manfaat pengelolaan sampah, serta dampak negatif apabila sampah tidak dikelola dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemilahan

sampah rumah tangga. Sebagian masyarakat telah mampu membedakan sampah organik, anorganik, dan residu serta mulai menerapkan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan Mardikanto yang menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara mandiri.

b. Motivasi

Motivasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dibangun melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. DLH Kota Cimahi secara aktif memberikan dorongan kepada masyarakat melalui sosialisasi, pembinaan kader lingkungan, serta pengembangan program bank sampah yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat tidak hanya memahami manfaat lingkungan dari pemilahan sampah, tetapi juga memperoleh nilai tambah ekonomi dari sampah yang dapat didaur ulang.

Peningkatan motivasi terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Namun demikian, tingkat motivasi masyarakat masih berbeda antarwilayah. Beberapa masyarakat masih menganggap pemilahan sampah sebagai aktivitas yang merepotkan sehingga belum dilakukan secara konsisten. Oleh sebab itu, diperlukan upaya motivasi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar perilaku memilah sampah menjadi budaya masyarakat.

c. Kemandirian

Kemandirian merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan proses pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah mampu melakukan pemilahan sampah secara mandiri tanpa ketergantungan penuh terhadap pemerintah. Hal ini terlihat dari keberhasilan beberapa wilayah dalam mengelola bank sampah secara mandiri, tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, serta keterlibatan aktif kader lingkungan dalam menggerakkan kegiatan pengelolaan sampah.

Jika ditinjau dari teori Mardikanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses *empowering* telah berjalan cukup baik karena masyarakat

tidak lagi hanya menjadi objek program, melainkan telah berperan sebagai subjek yang aktif dalam pengelolaan sampah. Meskipun demikian, tingkat kemandirian masyarakat masih belum merata sehingga memerlukan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Dimensi *Protection* (Perlindungan)

Dimensi *protection* bertujuan memberikan perlindungan, pengawasan, dan penanggulangan terhadap berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Perlindungan diperlukan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aman, adil, dan berkelanjutan dalam kegiatan pemilahan sampah.

a. Perlindungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH Kota Cimahi telah memberikan perlindungan kepada petugas lapangan melalui jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, masyarakat yang terlibat dalam program pengelolaan sampah memperoleh pembinaan, pendampingan, dan dukungan dari pemerintah daerah. Bentuk perlindungan ini bertujuan menciptakan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 juga menjadi bentuk perlindungan hukum yang memberikan dasar pelaksanaan pengelolaan sampah dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dengan adanya regulasi tersebut, masyarakat memiliki kepastian mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah.

b. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilahan sampah dilakukan melalui monitoring kegiatan masyarakat, pembinaan kader lingkungan, serta evaluasi program secara berkala. DLH berperan sebagai lembaga pembina yang melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan program di lapangan. Namun, dalam hal penegakan peraturan daerah, kewenangan utama berada pada Satpol PP. DLH hanya melakukan koordinasi dan kolaborasi apabila ditemukan pelanggaran terkait pengelolaan sampah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan, tetapi belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan masih adanya masyarakat yang belum tertib dalam memilah sampah rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara DLH, Satpol PP, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

c. Penanggulangan

Dalam menghadapi berbagai kendala dan pelanggaran, DLH Kota Cimahi melakukan berbagai langkah penanggulangan melalui pembinaan, edukasi, sosialisasi ulang, serta kolaborasi dengan Satpol PP. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pemilahan sampah rumah tangga.

Meskipun langkah penanggulangan telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan aturan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya masyarakat yang membuang sampah tanpa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Dengan demikian, dimensi *protection* telah dilaksanakan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih konsisten, penerapan sanksi yang tegas, dan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang patuh dalam memilah sampah.

KESIMPULAN

Berdasarkan ketiga dimensi pemberdayaan menurut Mardikanto, dapat disimpulkan bahwa DLH Kota Cimahi telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketertiban memilah sampah rumah tangga melalui penyediaan sumber daya, fasilitas, edukasi, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Dimensi *empowering* merupakan dimensi yang menunjukkan hasil paling kuat karena berhasil meningkatkan kapasitas, motivasi, dan kemandirian masyarakat. Sementara itu, dimensi *enabling* dan *protection* telah berjalan cukup baik, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas, belum meratanya sosialisasi, dan belum optimalnya pengawasan serta penegakan aturan. Oleh karena itu, pemberdayaan yang dilakukan DLH Kota Cimahi dapat dikatakan

sudah terlaksana dan berhasil meningkatkan ketertiban memilah sampah rumah tangga, namun hasilnya belum optimal dan masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardikanto, T. D. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Mardikanto. (2004). *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep dan Implementasi*.
- Onny S. Prijono &, A. (1996). *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*.
- Mardikanto. (2010). *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep dan implementasi*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Sugiyono. (2019 : 2). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat : Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial*. Refika Aditama.
- Suharto, E. (2017 : 59-60). *Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Mardikanto, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan Artikel

- M.R.R. Fadillah, N.A. Latifah, M. (2025). Program Pangkas untuk Pemberdayaan Pemilahan Sampah Rumah Tangga di Desa Pejambuan, Kalimantan Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, 3, 3.
- Rina Yulianti dan Ipah Ema Jumiati. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Sampah di Desa Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Septia Pristi Rahmah, Raldi Hendro L Koestoer. (2024). Penerapan Reduce, Reuse, Recycle (3R) Dan Manajemen Pengelolaan Sampah Perkotaan : A Systematic Literature Review. *Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan*, 5, 2.
- Yasin, A., dan Pratiwi, D. I. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan: Studi Kasus Di Kampung Salo Kendari. *Journal of Community Service (JCS)*, 6, 1-8.

- Zimmerman. (2000). *Empowerment theory : Psychological, organizational, and community levels of analysis*. New York: Kluwer Academic.
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama.
- Sudharto. (2010). *Pengelolaan Limbah Padat* . Bandung: ITB Press
- Soewondo, P. (2015). *Teknologi Pengolahan Limbah*. ITS Press.
- Rahardjo, S. (2006 : 85). *Membedah Hukum Progresif*. Kompas Gramedia.
- Rappaport. (1981 : 1-25). *In praise of paradox : A social policy of empowerment over prevention*. American Jurnal of Community Psychology.
- Rappaport, J. (1984). *Studies in Empowerment : Steps Toward Understanding and Action*.
- Rathje. (2002). *Municipal solid waste in the united states. Rubbish! The archaeology*.
- Rathje, W. (2006). *The performance economy* . Palgrave Macmillan.
- Ife, J. (1995). *Community Development in the third world*. Longman.
- Kabeer, N. (2020). *Gender, Labour Markets and the Sustainable Development Goals : A Global Perspective*. London: Routledge.
- Prastowo. (2012). *Uji Dependabilitas (Dependability)*.
- Connett, P. (2013). *Dalam "The zero waste solution*. Chelsea Green Publishing.
- Durkheim, E. (1933 : 181). *The Divison of Labor In Society*. Free Press.
- Elisa Susanti, H. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah di Kota Cimahi. *JANE*, 13.
- H. Schwartz, S. (1977). *Normative influences on altruism*, 10(nilai manusia dan motivasi altruistik), 221-279.
- Agamben, G. (1998). *Homo Sacer : Sovereign Power and Bare Life*. Stanford: Stanford University Press.
- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*, 50, 179-211.
- Brundtland. (1987). *World Commision on Environment and Development (WCED)*. Oxford: Oxford University Press.

Website:

detikjabar.com (2025). Masalah Sampah di Kota Cimahi yang tak kunjung terselesaikan
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7889731>

Dokumen:

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 14

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).